

---

**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI ASET PADA DINAS  
PENDAPATAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

Chriswanto Ignatius Makitulung<sup>1</sup>, Ventje Ilat<sup>2</sup>, Trees Runtu<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado,  
95115, Indonesia

E-mail: chris\_makitulung@yahoo.com

**ABSTRACT**

*An asset is a resource that is absolutely necessary for the conduct of the Government. Government assets can be classified as financial assets and non-financial. Financial assets include cash, accounts receivable and investment. While the nonfinancial assets consist of assets which can be identified and which could not be identified. Intangible assets in the form of asset inventory (asset smoothly) and fixed assets, which in laws-known as an invitation of goods belonging to the country/region (BMN). The purpose of this research is to know the systems and procedures of Accounting Assets At the service of the Financial management of Income And assets of the Sangihe Islands Regency Area, with research methods used, are methods of data analysis that is descriptive. The results of the research on the system and procedure for an accounting of assets in the Sangihe Islands Regency indicates that the system and procedures of accounting assets are presented properly and in accordance with the government accounting system.*

*Keywords: Accounting Asset*

**1. PENDAHULUAN**

Aset merupakan sumberdaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dapat diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang mencakup kas, piutang, dan investasi dan non keuangan yang mencakup aset berwujud dan tidak berwujud. Aset keuangan mencakup kas, piutang dan investasi. Sedangkan aset nonkeuangan terdiri dari aset yang dapat diidentifikasi dan yang tidak dapat diidentifikasi.

Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan yang tertulis pada bab VII Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, aturan tersebut tentang Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah/diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

**2. TINJAUAN PUSTAKA**

**Akuntansi.** *Accounting Principles Board (APB) No. 4* Menyatakan bahwa : “Akuntansi adalah aktivitas jasa , dimana fungsinya adalah memberikan informasi yang kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi, yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (dalam membuat pilihan diantara berbagai alternatif)”. (Hery 2013:3).

**Akuntansi Sektor Publik.** Menurut Indra Bastian (2010:3) akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai : “Mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”.

### **Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset**

#### **Sistem dan Prosedur Pengadaan Aset (barang milik negara/daerah)**

1. Dilaksanakan oleh tim pengadaan barang milik negara/daerah dan dikoordinasi oleh fungsi perlengkapan yang bertujuan untuk tertib administrasi dan optimalisasi pendayagunaan serta tertib inventarisasi.
2. Pengadaan barang dapat melalui pengadaan/pemborong pekerjaan, swakelola, hiba atau sumbangan, sewa beli, pinjaman, dan guna usaha.
3. Prosedur pengadaan barang dimulai dari perencanaan kebutuhan barang oleh masing-masing kementerian atau lembaga atau SKPD dan diakhiri dengan dilaksanakannya pengadaan barang yang dibutuhkan oleh panitia pengadaan barang.
4. Pengadaan barang milik negara/daerah harus mengikuti peraturan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa.

#### **Sistem dan Prosedur Penyimpanan dan Penyaluran**

1. Penyimpanan.
2. Prosedur penyimpanan dan penyaluran barang.

#### **Sistem dan Prosedur Pemanfaatan**

1. Pemanfaatan barang
2. Prosedur pemanfaatan barang

#### **Sistem dan Prosedur Pemeliharaan**

1. Pemeliharaan barang
2. Prosedur pemeliharaan barang ini meliputi kegiatan.
3. Dimulai dari perencanaan pemeliharaan barang.

#### **Sistem dan Prosedur Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi**

1. Pengamanan dan penyelamatan BMN.
2. Ketentuan berupa tuntutan perbendaharaan (TP) terhadap pemegang barang.

#### **Sistem dan Prosedur Perubahan Status Hukum**

1. Perubahan status hukum.
2. Penghapusan barang dan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan.

**Penelitian Terdahulu.** Rizal Efendy (2015) dalam penelitian berjudul Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Aset Tetap Berdasarkan SAK ETAP Pada CV. Sekonjing Ogan Ilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga yang perolehan aset tetap hanya diakui sebesar harga faktur (harga beli) saja tanpa memperhitungkan biaya-biaya yang berhubungan dengan perolehan kendaraan tersebut yang mana siap untuk digunakan. Perusahaan mengakui biaya perolehan kendaraan tersebut sebagai beban periode berjalan.

### **3. METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian.** Deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

**Tempat dan Waktu Penelitian.** Tempat penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Waktu penelitian dimulai dari bulan November 2016.

#### **Prosedur Penelitian**

1. Mengidentifikasi latar belakang masalah.
2. Merumuskan masalah.
3. Mencari literatur-literatur yang terkait.
4. Mengumpulkan data.
5. Menganalisa Aset.
6. Menarik kesimpulan dan memberikan saran.

**Metode Pengumpulan Data**

**Jenis Data**

1. Kualitatif
2. Kuantitatif

**Sumber Data**

1. Primer
2. Sekunder

**Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara
2. Dokumentasi

**Metode Analisis Data.** Metode yang digunakan adalah metode analisis data yang memiliki sifat deskriptif.

**Teknik Analisis Data**

- a. Mengumpulkan data.
- b. Memperoleh gambaran umum serta mengetahui permasalahan.
- c. Mempelajari data.
- d. Mengolah data.
- e. Membandingkan hasil yang diperoleh.
- f. Menarik kesimpulan.

**4.HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Hasil penelitian**

*Tanah*

Belanja Modal Tanah	Rp XXX	
Rekening Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RK-PPKD)		Rp XXX
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp XXX	
RK-PPKD		Rp XXX
Peralatan dan Mesin	Rp XXX	
Di investasikan dalam aset tetap		Rp XXX
Belanja Modal	Rp XXX	
RK-PPKD		Rp XXX
Gedung dan Bangunan	Rp XXX	
Di investasikan dalam Aset Tetap		Rp XXX

*Jalan, Irigasi, dan Jaringan*

Jurnal belanja modal tersebut adalah :		
Belanja Modal	Rp XXX	
RK-PPKD		Rp XXX
Jurnal korolari tersebut adalah :		
Jalan, irigasi, dan jaringan	Rp XXX	
Diinvestasikan dalam aset tetap		Rp XXX

*Aset Tetap Lainnya.*

Jurnal Pengakuan Belanja Modal tersebut adalah :		
Belanja Modal	Rp XXX	
RK PPKD		Rp XXX
Jurnal korolari pengakuan perolehan Aset tetap lainnya:		
Aset Tetap Lainnya	Rp XXX	
Diinvestasikan dalam aset tetap		Rp XXX

## 4.2. Pembahasan

### Tanah

Belanja Modal	Rp	2.930.000.000
RK PPKD		Rp 2.930.000.000

### Jurnal Mengakui Tanah :

Tanah	Rp	2.930.000.000
Diinvestasikan dalam aset tetap		Rp 2.930.000.000

### Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	84.800.000
RK PPKD		Rp 84.800.000
Peralatan dan Mesin	Rp	84.800.000
Diinvestasikan dalam Aset Tetap		Rp 84.800.000

### Gedung dan Bangunan

Nilai Perolehan yang disajikan dalam neraca adalah sebesar Rp 17.146.000.000

### Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jurnal yang di buat oleh PU:

Belanja Modal	Rp	850.000.000.0000
Piutang Dari Kas Umum Negara		Rp 850.000.000.000

Jurnal mengakui jalan :

Tanah	Rp	200.000.000.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	650.000.000.000
Diinvestasikan dalam Aset Tetap		Rp 850.000.000.000

### Asset Tetap Lainnya

Belanja Modal	Rp	10.000.0000.000
Piutang dari Kas Umum Negara		Rp 10.000.000.000

### Konstruksi Dalam Pengerjaan

Belanja Modal	Rp	450.000.000
RK PPKD		Rp 450.000.000

Jurnal pengakuan KDP :

KDP Gedung	Rp	450.000.000
Diinvestasikan Dalam Aset tetap		Rp 450.000.000

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

1. Sistem dan prosedur akutansi aset di DPPKAD Kabupaten Kepulauan Sangihe penyajiannya sudah sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan.
2. DPPKAD Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menyajikan sistem dan prosedur akutansi aset sesuai dengan standar akutansi pemerintah, karena informasi/data aset dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, dan benar menurut kaidah standar akutansi, aspek hukum dan aspek teknis manajemen aset negara dan keadaan database di pastikan penggunaannya secara fisik oleh Pemerintah daerah dan sistem dan prosedur diterima dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

### 5.2. Saran

1. Cara penyajian sistem dan prosedur akutansi aset pada DPPKAD Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah sesuai Standar Akutansi Pemerintahan, untuk itu dapat menjadi contoh untuk SKPD lainnya.
2. DPPKAD Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat mempertahankan kinerjanya dengan menyajikan sistem dan prosedur akutansi aset dengan baik dalam rangka mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku di bidang akuntansi sehingga dapat memberikan manfaat dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Cluj-Napoca. ( 2014 ). *Developments and Insights into the Valuation of Fixed Assets for Financial Reporting Purposes*. Babes-Bolyai University The faculty Of Economics and Business Administration Accounting and Audit Department. Page 2-23.
- Gladys Rumondor (2012). *Analisis Efektivitas Sistem dan Prosedur Akutansi Aset Pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Minahasa Selatan*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi.
- Mahmudi. 2010. *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Edisi ke dua. Penerbit STIM YKPN, Yogyakarta
- Mahmudi, 2011. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mahsun, Mohamad, 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta
- Misliana (2014). *Analisis Akutansi Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Tanjung Pinang*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Muhamad Sahlan (2015). *Analisis Permasalahan Aset Tetap Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi kasus pada entitas pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang.
- Navyana Putri Paraesthivyna (2014 ). *Perlakuan Akutansi Aset Tetap serta penyajiannya dalam laporan keuangan (Studi Pada CV Miulan Semarang)*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Pham Duc Binh ( 2014 ). *Tangible Fixed Assets Accounting System for Enterprise in Vietnam*. University Of Hai Duong , Hai Duong, Vietnam. Vol.6. Page 30-37
- Siti Muarofah (2013). *Evaluasi Sistem Informasi Akutansi Aset Tetap Untuk Meningkatkan Pengendalian Internal ( Studi kasus pada perusahaan kemasan plastik di sidoarjo )*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-17. Bandung: Alfabeta ya.
- Vindy Perdana Putra ( 2014 ). *Insentif Keputusan Revaluasi Aset Tetap ( Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia )*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.